

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN



Jl. Pembangunan No. 7 Telp. 0517-31052, 31510 Fax. 0517-31052
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71111

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi pemerintah perlu untuk dikembangkan media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , sedangkan Penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan . Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Maka Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tapin menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 dengan menyajikan mengenai keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga membawa manfaat dan keberhasilan bagi semua.



Rantau, Februari 2022

Kepala,

HJ.AHLUL JANAHS.Pd,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641012 198305 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok , Fungsi Dan Struktur Organisasi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	14
1.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	16
1.5 Peluang Pengembangan Pelayanan Skpd	16
1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2020.....	16
1.7 Sistematika Laporan	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Strategi	21
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.3 Perjanjian Kinerja	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Realisasi Anggaran	62
BAB IV : PENUTUP	67
Lampiran – Lampiran :	
1. SK TIM LKIP Tahun 2021	
2. SK IKU	
3. Lampiran PK beserta IKI dan Capaiannya s/d triwulan IV	
4. Lampiran Cascading / Kinerja	
5. Lampiran Rencana aksi beserta Capaiannya. s/d Triwulan IV	
6. Cross Cutting	
7. LHE SAKIP 2020	

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Mekanisme Penyusunan

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Program dan Kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku .

B. Mekanisme Pengukuran

- Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin “ Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia , Sejahtera yang Tangguh dan Mandiri “ yang mempunyai makna Agar setiap keluarga dapat memperoleh kebahagiaan melalui ber – Kb dengan slogan dua anak cukup sehingga terciptanya keluarga yang kecil bahagia , yang mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan wajar , baik secara rohani , jasmani maupun sosial.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis , selanjutnya sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 4 (empat) Indikator Kinerja utama

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kab. Tapin dalam program capaian program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan Keluarga dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Capaian Indikator Kinerja kegiatan dimaksud terdapat dalam tabel berikut:

Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Renstra realisasi
Per 31 Desember 2021

No	Sasaran Strategis dalam Renstra	Indikator Kinerja	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021
1	Meningkatnya kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan kesertaan ber-KB (CPR)	83,20	85,27
2		Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeed Need)	9,82	7,22
3	Terkendalinya angka kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari pasangan Usia Subur	2,16	1,7
4	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase masyarakat desa yang berpartisipasi dalam program (KKBPK)	77	99,80

Sasaran Program dan Capaian Indikator kinerja dalam Renstra realisasi Per 31 Desember Tahun 2021 :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Kelahiran Total (TFR) per WUS (15 -49) tahun	2,09%	2,26%
2		Persentase peserta KB aktif MKJP	8,87%	13,55%
3	Meningkatnya Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga (UPPKS,BKB, BKL , BKL dan Pik R)	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK –R) yang aktif	68,02%	91,23%
4		Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL	73,61%	92,15%
5		Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB	83,98%	70,58%
6		Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	92,09%	86,82%
7	Meningkatnya	Jumlah sekolah	2	6

	Jumlah sekolah yang dibina oleh program KKBPK	yang dibina terkait masalah kependudukan		
9	Tersedianya data dan Informasi keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase Data yang dimanfaatkan dalam program kependudukan keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga	75%	100%
10	Meningkatnya Kampung KB yang aktif	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	40%	96%

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kab. Tapin pada Tahun 2021 yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar Rp. 10.174.271.476,- (Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.898.828.028,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) atau 87,46%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas tersendiri dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka menyelenggarakan Good Governance yang merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi serta cita-cita bangsa yang telah disepakati, yakni menetapkan tata cara Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II, III, dan IV) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kinerja Instansi, maka dibuatlah LKIP Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin, sehingga LKIP ini dapat dijadikan acuan secara transparan guna terciptanya integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi.

Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015– 2019 menyebutkan bahwa program KB merupakan rangkaian pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya mengendalikan kualitas penduduk melalui terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas.

Sejalan dengan amanat reformasi dengan semangat desentralisasi otonomi Daerah diharapkan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat membantu dan mempercepat pembangunan lainnya, diberbagai sektor

terkait walaupun dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, sistimatis dan berkoordinasi sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada.

Namun demikian perlu adanya upaya Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam kerangka jalinan sinkronisasi dan koordinasi yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga suksesnya pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dapat memberikan kontribusi untuk suksesnya pembangunan di Kabupaten Tapin.

1.2. TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016). DPPKB merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DPPKB Kabupaten Tapin, melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Tapin khusus dan sesuai dengan tugas pokok adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan serta peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kabupaten Tapin berpedoman pada Peraturan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
3. Pelaksanaan Pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
4. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB, Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelayanan KB;
6. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, Pembinaan kesertaan ber-KB, Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. Pembinaan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Unit Pelaksanaan Teknis;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariat;
10. Pembinaan Kelompok jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DPPKB Kabupaten Tapin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.
- b. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan
- c. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran .

- d. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan .
- e. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan .
- f. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan .
- g. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian . dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
- b. Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan .
- c. Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan . dan
- d. Menyusun program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan perencanaan dan rencana kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan Perencanaan program dan rencana kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan .

- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi .
- d. Melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi .
- e. Menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategik.
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan .
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan .
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- k. Merencanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan .
- l. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran .
- m. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan .
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran .
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan .
- p. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan . dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian .
- b. Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, pencetakan dan ekspedisi .
- c. Melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan refensi serta pemusnahan arsip .
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas .

- e. Melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran .
- f. Menyaipkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan .
- g. Melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris
- h. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan .
- i. Menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan .
- j. Menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan .
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan *bezetting formatie* .
- l. Menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai .
- m. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian .
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengelola data dan menyajikan informasi kepegawaian .
- o. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian .
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Teknis dibidang Pelaksanaan Keluarga Berencana.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan Penyelenggaraan norma, standar, Prosuder dan Kriteria di bidang Keluarga Berencana.
- c. Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten/Kota.
- e. Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan ber-KB di Kabupaten/Kota.
- f. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana.
- g. Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitasi di bidang Keluarga Berencana.
- h. Pelaksanaan Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugasnya, dan
- i. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alokon
- b. Seksi Pelayanan KB
- c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB

a. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alokon(alat, Obat Kontrasepsi)

Seksi Pengelolaan dan Distribusi alkon mempunyai melakukan penyiapan bahan pembinaan, Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,norma,standar,prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan distribusi alkon.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun, mengelola dan menganalisa data mengenai pengelolaan dan distribusi alkon KB;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alkon KB;
- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional dan pengendalian mengenai pengelolaan dan distribusi alkon KB;
- d) Melaksanakan kegiatan Bimbingan /Penyuluhan terhadap sistem pengelolaan dan distribusi alkon KB dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana ;
- e) Melaksanakan Evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan ditribusi alkon KB;
- f) Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembanagn serta pengendalian terhadap Pengelolaan dan distribusi alkon KB;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Pelayanan KB

Seksi Pelayanan KB mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan tekns,norma, standar,Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan Pelayanan KB

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai Pemakaian Kontrasepsi serta kesehatan reproduksi;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai strategi pelaksanaan pelayanan kontrasepsi serta kesehatan reproduksi;
- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional dan pengendalian mengenai pelayanan kontrsepsi serta kesehatan reproduksi;
- d) Melaksanakan Kegiatan bimbingan / penyuluhan terhadap pemakaian alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program keluarga berencana;

- e) Melaksanakan Evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pengendalian terhadap pelayanan kontrsepsi dan Kesehatan reproduksi;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

c. Seksi Pembinaan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis , norma, standar,prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan KB

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun, Mengolah dan Menganalisa data mengenai peran serta masyarakat dibidang keluarga berencana;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan mengenai pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dibidang keluarga berencana;
- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional dan pengendalian kegiatan peran serta masyarakat dibidang keluarga berencana;
- d) Melaksanakan kegiatan bimbingan / penyuluhan , program pengembangan bidang peran serta masyarakat dibidang keluarga berencana;
- e) Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan , hasil kegiatan pembinaan peran serta masyarakat dibidang keluarga berencana;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan peran serta masyarakat dibidang keluarga berencana;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b) Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- d) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia ;
- f) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g) Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ;
- i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas :

- a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b) Seksi Bina Ketahanan keluarga Balita , Anak dan Lansia;
- c) Seksi Bina Ketahanan Remaja

a. Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,norma, standar,prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun, Mengolah dan menganalisa data mengenai hasil Pelaksanaan pengembangan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan dan pembimbingan Petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas, peningkatan pengetahuan ,pengembangan kelompok dan prestasi serta gelanggang dagang bagi produk UPPKS;
- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria bagi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga sejahtera;
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi program Pemberdayaan keluarga sejahtera;
- e) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan keluarga Balita, Remaja dan Lansia mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis , norma, standar,prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun, Mengolah dan menganalisa data mengenai hasil Pelaksanaan pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan dan pembimbingan Petunjuk teknis dan pembinaan ,perkembangan program ketahanan keluarga balita,anak dan lansia;

- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria bagi pelaksanaan program pembinaan ketahanan balita, anak dan lansia;
- d) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pembimbingan, pelatihan dan pengendalian program ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- e) Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ketahanan balita, anak dan lansia;
- f) Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan balita anak dan lansia;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Menghimpun, Mengolah dan menganalisa data mengenai hasil Pelaksanaan pengembangan ketahanan Remaja;
- b) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan, pengembangan program ketahanan remaja;
- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program dan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria bagi pelaksanaan program pembinaan ketahanan remaja;
- d) Melaksanakan kegiatan pembinaan, Pembimbingan, Pelatihan dan pengendalian program ketahanan remaja;
- e) Melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ketahanan remaja;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketahanan remaja;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan Penggerakan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk,sistem informasi keluarga,Penyuluhan,advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk,sistem informasi keluarga , penyuluhan,advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk ,sistem Informasi keluarga ,penyuluhan,advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana;
- d) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- f) Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- h) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk,sistem informasi keluarga,Penyuluhan,advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk,sistem informasi keluarag,Penyuluhan,advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk,Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas :

- a) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan dan Kader KB ;
- c) Seksi pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advoaksi dan pengerakan mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis , norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Advokasi dan penggerakan;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan dan menyusun perencanaan bahan materi advokasi dan penggerakan;
- b) Melaksanakan pembimbingan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan advokasi;
- c) Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan;

- d) Melaksanakan kerjasama dengan instansi , Stakeholder, pihak lain dalam melaksanakan advokasi dan penggerakan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan Lini Lapangan dan Kader KB

Seksi Pendayagunaan Lini Lapangan dan Kader KB mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pembinaan ,Pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis , norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB / PLKB dan IMP .

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan dan menyusun perencanaan bimbingan dan petunjuk teknis penyuluhan dan pendayagunaan lini lapangan dan kader KB;
- b) Melaksanakan bimbingan dan Pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan lini lapangan dan kader KB;
- c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan lini lapangan dan kader KB;
- d) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak lain dalam pelaksanaan penyuluhan dan pendayagunaan lini lapangan dan kader KB;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga

Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis , norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan Informasi keluarga.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan bahan dan materi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b) Melaksanakan Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c) Menghimpun, mengolah dan menganalisa serta mengevaluasi data kependudukan dan informasi keluarga;
- d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- e) Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pihak lain yang terkait dengan pengendalian penduduk dan informasi kependudukan;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Gambaran pembagian tugas kepada masing-masing unsur dalam organisasi dapat digambarkan pada struktur organisasi. Struktur organisasi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahi 1 (satu) sekretaris dan 3 (tiga) bidang .

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi

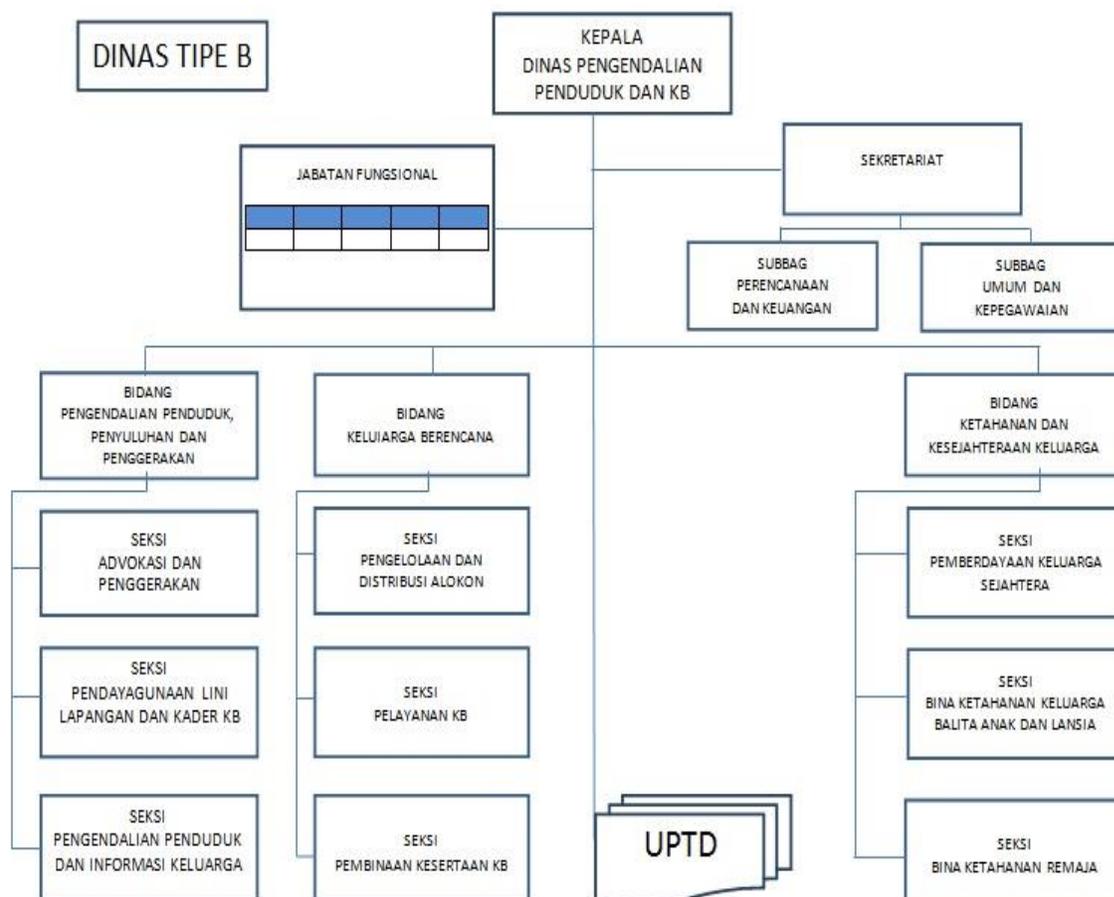
- Seksi Pengelolaan dan Distribusi alokon
- Seksi pelayanan KB
- Seksi Pembinaan kesertaan KB

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga , membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan lansia
- Seksi Bina Ketahanan remaja

Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi advokasi dan penggerakan
- Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Lini Lapangan dan kader KB
- Seksi pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh DPPKB Kabupaten Tapin adalah melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/pembinaan dengan instansi terkait tingkat kab dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan keluarga berencana.
2. Koordinasi/pembinaan dengan instansi terkait tingkat kab dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan peran serta masyarakat dalam peningkatan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan keluarga berencana.
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan , mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Proses penyelenggaraan pelayanan didukung oleh:

a. Sumberdaya Manusia.

Sumberdaya Manusia DPPKB Kabupaten Tapin Per 31 Desember 2021 sebanyak 20 orang yang disebar pada 4 bidang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

No	Struktur Pegawai	Sekretariat	KB	KS	Dalduk	Jumlah
1.	IV/d	0	0	0	0	0
2.	IV/c	1	0	0	0	1
3.	IV/b	0	0	0	0	0
4.	IV/a	0	0	2	1	3
	Jumlah	1	0	2	1	4
5.	III/d	2	3	2	1	8
6.	III/c	1	0	0	0	1
7.	III/b	0	1	0	2	3
8.	III/a	2	1	0	0	3
	Jumlah	5	5	2	3	15
9.	II/d	0	0	0	0	0
10.	II/c	0	0	0	0	0

11.	II/b	1	0	0	0	1
12.	II/a	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	0	0	0	1
13.	I/d	0	0	0	0	0
14.	I/c	0	0	0	0	0
15.	I/b	0	0	0	0	0
16.	I/a	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0
	Total	7	5	4	4	20

Struktur pendidikan sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1), Lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Sekolah Dasar	0
2.	SLTP	0
3.	SLTA	2
4.	Diploma1	0
5.	Diploma2	0
6.	Diploma3	2
7.	Diploma4	0
8.	Sarjana	11
9.	Master/Pasca Sarjana	5
10.	Doktor/S3	0
	Jumlah	20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPPKB dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 3 orang Kepala Bidang yang masing-masing dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi dan 1 orang sekretaris yang dibantu oleh 2 orang Kepala sub Bagian. Skala jabatan Kepala DPPKB adalah eselon IIB, Sekretaris adalah eselon IIIA dan Kepala Bidang adalah eselon IIIB serta Kasubid dan Kasubag adalah eselon IVA. Masing-masing Kasubag dan Kasubid dibantu oleh tenaga pelaksana dengan Keterangan sebagai berikut:

No.	Sekretariat/Bidang	Sekertaris/ Kabid	Subag/ Subid	Tenaga Pelaksana	JML
1	Sekretariat	1	2	3	6
2	Bidang KB	1	3	1	5
3	Bidang KS	1	3	0	4
4	Bidang Dal,Duk,Luh	1	3	0	4
	Jumlah	4	11	4	19

1.4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, meliputi :

- 1) Masih rendahnya Pemakaian Metode MKJP, MOW dan MOP
- 2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB ,hal ini terkait dengan adat dan budaya setempat, dimana masih banyak yang berpegang pada budaya banyak anak banyak rezeki yang sudah lama dipercayai masyarakat, bahkan ada pula sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa program KB berseberangan dengan pandangan agama;
- 3) Masih cukup tingginya angka kelahiran sehingga perlu upaya optimal untuk mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang;
- 4) Belum optimalnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MOW dan MOP) ;

1.5. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Tapin , meliputi :

- 1) Memperluas dan mempermudah jangkauan pelayanan Kontrasepsi dan penyebaran Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat luas serta meningkatkan koordinasi dan kegiatan operasional pelayanan;
- 2) Menggalang kemitraan dengan tokoh masyarakat dan pihak – pihak lain yang terkait dalam upaya mensosialisasikan program KB kepada masyarakat.

1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Progres Nilai SAKIP DPPKB Tahun 2018-2020

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	65,08	B
2	2019	71,23	BB
3	2020	80,89	A

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP DPPKB Tahun 2020

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Perencanaan Kinerja: Implementasi Perencanaan Kinerja Sangat Memuaskan (AA) dan memiliki system manajemen kinerja yang sangat andal	Berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja yang telah dicapai
2	Pengukuran Kinerja: Implementasi Pengukuran Kinerja Memuaskan (A) , akuntabilitas kinerjanya baik memiliki system manajemen kinerja yang andal	Berkomitmen dalam upaya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan akan meningkatkan pengukuran kinerjanya
3	Pelaporan Kinerja: Implementasi Pelaporan Kinerja Memuaskan (A) , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel	Laporan Kinerja sudah Memuaskan tapi akan lebih ditingkatkan lagi

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
4.	Evaluasi Internal: Evaluasi Internal Baik (B) , Akuntabilitas Kinerjanya sudah baik memiliki system yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.	Akan meningkatkan Evaluasi Internal dalam Dinas PPKB agar Akuntabilitas kinerja lebih baik
5.	Pencapaian Kinerja: Implementasi Pencapaian Kinerja Cukup Baik (CC) , system dan tatanan dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja	Capaian Kinerja akan lebih ditingkatkan lagi agar mendapat pencapaian kinerja yang lebih baik.

1.7. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan Penjelasan mengenai Pertanggung Jawaban Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam mencapai tujuan / sasaran Strategis selama tahun 2021. Selanjutnya Capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan rencana kerja tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Untuk memudahkan pemahaman maka penyajian Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dengan sistematika Penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini akan menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) SK TIM LKIP Tahun 2021
- 2) SK IKU
- 3) Lampiran PK beserta IKI dan Capaiannya s/d triwulan IV
- 4) Lampiran Cascading / Kinerja
- 5) Lampiran Rencana aksi beserta Capaiannya. s/d Triwulan IV

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program / kegiatan yang ada di SKPD juga memberikan target (Quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan Kinerja merupakan tekat dan janji, Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiaya dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan agar lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Tapin dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tapin. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018 -2023 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kabupaten Tapin yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demi untuk bisa mendukung Visi Bupati Tapin Terpilih yang telah dirumuskan kedalam RPJMD kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 yaitu “*BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS*” dengan misi yang berkaitan dengan satuan kerja perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang agamis, sehat, Cerdas, berbudaya dan berdaya saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan Pariwisata yang dimulai dari desa.

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil –hasil serta manfaat yang akan diberikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal maka tujuan pembangunan jangka menengah DPPKB kab. Tapin antara lain:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Sekretariat
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan
- 3) Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tertentu, bulanan, semester atau tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tapin sebagai langkah untuk mencapai tujuan , maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Meningkatnya Kesertaan ber-KB
3. Terkendalinya Angka Kelahiran
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi, jika ditemukan permasalahan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang focus pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran strategy is serta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Meningkatkan Kesertaan ber – KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber –KB (CPR)
		Persentase Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber –KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

2	Terkendalnya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari pasangan usia subur
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan

Uraian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Tapin beserta penjelasan/perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Uraian Indikator Kinerja Utama beserta penjelasannya

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
Meningkatnya kesertaan ber-Kb	Persentase Peningkatan Kesertaan ber –KB (CPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	Pasangan Usia Subur (PUS) yang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi, alasan : Mengetahui capaian penggunaan alat kontrsepsi KB
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS)yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	$\frac{\text{Jumlah PUS IAT} + \text{TIAL}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	Pasangan usia subur yang tidak ber-KB karena alasan ingin punya anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, alasan : Mengurangi PUS yang tidak ber-KB
Terkendalnya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah anak dari Pasangan Usia Subur	$\frac{\text{Jumlah Anak PUS}}{\text{Jumlah PUS}} \times 1000$	Jumlah anak yang dimiliki dalam pasangan usia subur . alasan : untuk mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga
Meningkatnya partisipasi	Persentase Kelompok	$\frac{\text{Semua Kegiatan KKBPK}}{\text{Kegiatan yang dilaksanakan KKBPK}} \times 100 \%$	Meningkatkan Partisipasi masyarakat

<p>masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)</p>	<p>Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan</p>		<p>terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga</p>
--	---	--	---

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mendukung capaian rencana strategis 2021, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana membuat perjanjian kinerja dari Esselon II, III dan IV , untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja , yang perjanjian kinerja ini di buat dengan tujuan :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, Transparansi dan kinerja aparatur,
- b) Wujud nyata komitmen,
- c) Dasar evaluasi kinerja aparatur,
- d) Dasar melakukan monitoring dan Evaluasi
- e) Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan Program, kegiatan , Sub Kegiatan dan sasaran di tahun 2021 yang menjadi tumpuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin untuk mewujudkan kinerja Outcome dan Output yang di tetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di mana Indikator Kinerja Utama sudah tertuang dalam Renstra Tahun 2018 -2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Esselon II , III dan IV pada tahun 2021 dengan Indikator Kinerja dan target pada Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (Esselon II) dan Target Tahun 2021				
A	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1.	Meningkatnya kesertaan ber-KB	Persentase peningkatan kesertaan ber-KB (CPR)	83,20
			Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,82
	2	Terkendalinya angka kelahiran	Rasio Jumlah anak dari pasangan usia subur	2,16
	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	77
Indikator Kinerja (Esselon III) dan Target Tahun 2021				
B	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Bidang Keluarga Berencana				
	1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Persentase peserta KB aktif MKJP	14%
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan				
	2	Meningkatnya kampung KB yang aktif	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	40%
	3	Tersedianya data dan Informasi keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	75%
	4	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Persentase kelahiran total (TFR) Per WUS (15 – 49 tahun)	2,09%

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	6	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam pembinaan keluarga (UPPKS, BKL ,BKB dan BKR)	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling Remaja (PIK – R) yang aktif	68,02%
			Persentase keluarga ber-KB aktif dalam bina keluarga Remaja	92,36%
			Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL	73,61%
			Persentase keluarga ber – KB yang aktif dalam BKB	83,98%
			Persentase keluarga ber – KB yang aktif UPPKS	92,09%
Indikator Kinerja (Esselon IV) dan Target Tahun 2021				
C	No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Kepala Seksi Bidang Keluarga Berencana				
	1	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	Jumlah alat kontrasepsi yang terpasang (Aks)	978 aks
			Jumlah MOP/MOW yang dilaksanakan	4 aks
	2	Terbinanya peserta KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%
	3	Ketersediaan alat kontrasepsi di setiap lini	Persentase alat kontrasepsi yang tersedia	65%
			Persentase Alokon yang didistribusikan tepat waktu	85%
Kepala Seksi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan				
	4	Terlaksananya pembinaan Lini Lapangan , kader KB dan Sekolah	Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK (org)	25org
			Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2 sekolah

			Jumlah kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK (kader)	273 kader
5	Ketersediaan data KKBPK		Jumlah data basis KKBPK yang tersedia (bh)	60 bh
			Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK (org)	36 org
6	Partisipasi Mitra Kerja / lintas sektor dalam pembinaan kampung KB		Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%
Kepala Seksi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
7	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan (BKR dan PIK –R)		Jumlah Lomba Poktan PIK Remaja, kelompok dan kader BKR	24 kel.
			Jumlah PIK Remaja jalur pendidikan (kel.)	15 kel.
			Jumlah PIK Remaja jalur masyarakat (Kel.)	25 kel.
8	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan (BKB dan BKL)		Jumlah BKB dan BKL yang terbina (Kel.)	152 kel.
			Jumlah BKB,BKL yang mengikuti Lomba (Kel.)	24 kel.
9	Terlaksananya pembinaan kelompok kegiatan UPPKS		Jumlah Uppks yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (PPKS) (Kel.)	25 kel.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Tapin Tahun 2021, guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2021 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui capaian kinerja. Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

<i>No</i>	<i>Rentang Capaian</i>	<i>Katagori Capaian</i>
1.	85 % - > 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % - > 85 %	Berhasil
3.	55 % - > 70 %	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Kurang Berhasil

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada Renstra tahun 2018 – 2023 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara garis besar penetapan Perjanjian kinerja tahun 2021 meliputi 3 (tiga) Sasaran strategis, dan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama yang tersaji sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

<i>Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Target Tahun 2021</i>	<i>Capaian Tahun 2021</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	83,20%	85,21 %
	Persentase Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,82%	7,22 %
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,16	1,7
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	77%	99,80 %

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana kab.Tapin.

Adapun pengukuran kinerja 4 (empat) indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR) adalah Pasangan Usia subur yang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi KB seperti IUD sebesar 513 , MOW sebesar 470 , MOP sebesar 56 ,Kondom sebesar 537, Impant sebesar 3825, suntik sebesar 17.000, dan Pil sebesar 13.484 sesuai dengan Laporan data Bulanan Pengendalian Lapangan . dengan cara perhitungan Jumlah Peserta KB aktif (35.893) di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur (42.122)* 100= 85,21%.
2. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan waktu itu, wanita yang belum haid setelah melahirkan anak yang tidak diinginkan waktu itu, dan wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum haid setelah melahirkan dan tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran sebelumnya, atau suatu kondisi yang mengisyaratkan ke inginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia , sehingga mengambil keputusan tidak menggunakan alat kontrasepsi KB. Dengan rincian sesuai dengan laporan bulanan pengendalian lapangan di tingkat kabupaten , IAT sebesar 1.674 dan TIAL sebesar 1.366 Dengan perhitungan jumlah PUS IAT+TIAL (3.040) / Jumlah PUS (42.122) * 100 = 7,22 % . Yang dimaksud dengan IAT adalah pasangan usia subur yang ingin anak di tunda sedangkan TIAL adalah Pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi.
3. Rasio Jumlah anak dari pasangan usia subur Menunjukkan perbandingan jumlah anak usia pasangan usia subur dengan Jumlah pasangan usia subur . dengan perhitungan jumlah anak pasangan usia subur dibagi jumlah PUS * 1000 . dengan Jumlah anak 69.832 / Jumlah PUS 42,112 * 1000 = 1,65 /1,7 .
4. Persentase masyarakat desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK , yang mana program KKBPK meliputi Kelompok kegiatan BKB, BKL, BKR dan UPPKS dengan perhitungan jumlah kelompok binaan KKBPK yang

menindaklanjuti hasil kegiatan dibagi Jumlah kelompok binaan KKBPK yang ada * 100 . dengan jumlah kelompok (BKB,BKR,BKL, UPPKS dan PIK –R) yang menindaklanjuti 505 / Jumlah kelompok (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK –R) yang ada 506 * 100 % = 99,80 %.

Pencapaian dalam program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan laporan Dallap (pengendalian lapangan) pelayanan peserta KB Baru menurut metode kontrasepsi sebesar 3.863 dan Jumlah Peserta KB aktif sebesar 35.893 .

Tabel 3.2

Capaian atas Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin per 31 Desember 2021

<i>Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran</i>	<i>Indikator Kinerja Utama</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi tahun 2021</i>	<i>Capaian Thn 2021 (%)</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	83,20%	85,21%	102,42%
	Persentase Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,82%	7,22%	136,01%
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,16	1,7	127,06%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	77%	99,80%	129,61%

Untuk Capaian Kinerja atas perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU	Kinerja Tahun Anggaran 2021		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
			Realisasi s/d TW IV	%				
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,16	1,7	127,06	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			4.196.240.545
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeed Need)	9,82%	7,22%	136,01 %				

	Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)	83,20 %	85,21%	102,49 %		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.510.835.100
							Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	50.850.000
							Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	327.525.000
							Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.913.100
							Penggunaan Media Massa Cetak , Elektronik dan Media Lainnya sesuai kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	174.219.000
							Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	883.728.000
							Pengendalian Program	

						KKBPK	71.600.000
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.937.567.000
						Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	27.850.000
						Penyediaan sarana Pendukung operasional PKB/PLKB	1.261.717.000
						Penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	648.000.000
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	813.034.200
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000

					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan		683.706.500
						Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	33.976.600
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	38.689.900
						Pembinaan Terpadu Kampung KB	611.040.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA			1.201.358.000

					(KS)		
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.169.050.700
						Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	97.630.100

						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	609.500.000
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.525.000
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	252.619.800
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	125.760.900

						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	17.121.000
						Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	25.893.900
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		32.307.300

							Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerak Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.237.800
							Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.479.900
							Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	6.589.600
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil	77%	99,80%	129,61 %	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			406.703.200

	Kegiatan							
						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		271.523.200
							Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	240.550.100
							Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.119.200

						Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	7.853.900
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	135.180.000
						Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900
						Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	59.750.100
						Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	39.965.200
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6.411.000

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja yang telah Ditetapkan dalam dokument rencana strategi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2018 - 2023 . berikut tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2020 , 2019 dan 2018 :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020, Tahun 2019 Dan Tahun 2018

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	82,88%	82,98%	83,12%	82,23%	83,16%	84,12%	83,20%	85,21%
		Persentase Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,92%	9,11%	9,88%	8,93%	9,84%	8,01%	9,82%	7,22%
2	Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	2,20 anak	2,19 anak	2,18 anak	2,16 anak	2,17 anak	2,25 anak	2,16 anak	1,7 anak
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	65%	70%	72%	76,69%	75%	77,44%	77%	99,80

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator kinerja Persentase peningkatan kesertaan ber-KB (CPR) per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 98,65 % dari tahun 2020 karena perbandingan Pasangan Usia Subur (PUS) dari tahun

2018 berjumlah 37.868 dan tahun 2019 berjumlah 40.664 dan tahun 2020 sebesar 40.536 dan tahun 2021 sebesar 42.122 dengan peserta KB aktif tahun 2018 sebesar 31.550, tahun 2019 sebesar 33.437 dan tahun 2020 sebesar 34.09 dan tahun 2021 sebesar 35.893.

Indikator persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) mengalami penurunan yang berarti bahwa wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali banyak yang sudah terlayani atau menggunakan kontrasepsi KB di mana dari tahun 2018 sebesar 9,10 dengan IAT sebesar 1.876 dan TIAL sebesar 1.817 dan tahun 2019 sebesar 8,93 , dengan jumlah IAT 2.025 dan TIAL 1.698 dan tahun 2020 sebesar 8,01 dengan Jumlah IAT 1.778 dan TIAL sebesar 1.469 dengan keterangan **IAT** (ingin anak tunda) dan **TIAL** (tidak ingin anak lagi) dan tahun 2021 untuk IAT sebesar 1.674 dan TIAL Sebesar 1.366.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Perbandingan capaian kinerja antara tahun ini dengan target jangka menengah di renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah

No	Kinerja Utama/ Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Realisasi Kinerja		
			Target Jangka Menengah	2021	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesertaan ber- KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	83,20%	83,20%	85,21%
		Persentase Pasangan Usia subur (PUS)yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,82%	9,82%	7,22%

2	Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Anak Pasangan Subur	Jumlah dari Usia	2,16 anak	2,16 anak	1,7 anak
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan		77%	77%	99,80%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk mencapai target akhir yang sesuai dengan Rencana strategi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dan sesuai dengan realisasi capaian pada indikator kinerja pada tahun 2018 , 2019 , 2020 dan 2021 maka target tersebut akan dapat di realisasikan pada akhir tahun renstra . untuk Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR) dari tahun 2018, 2019 ,2020 dan 2021 sudah melebihi target yang ada pada Renstra .

Sedangkan indikator persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet Need) dari tahun 2018 , 2019 2020 dan 2021 sudah melebihi target yang ada pada Renstra karena Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan, yang berarti pasangan usia subur (PUS) banyak yang menggunakan alat , obat kontrasepsi KB.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 hasil capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2021 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

- a) Target Persentase peningkatan kesertaan ber-KB (CPR) tahun 2021 sampai tercapai 85,21 % ,antara lain karena :
 - Pencanaan kampung KB pada 24 desa yang secara tidak langsung memberikan peningkatan dalam program KKBPK di wilayah kampung KB yang ada di kabupaten Tapin.
 - Adanya kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKL , BKR dan UPPKS
 - Adanya kerjasama antara PKK , TNI Kb Kes dan mitra kerja lainnya dalam program KKBPK
 - Pembinaan mengenai KB MKJP di daerah terpencil
 - Dibentunya Rumah dataku pada setiap kampung KB yang ada di kecamatan di kabupaten Tapin
- b) Target persentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) tahun 2021 sebesar 7,22 % antara lain karena :
 - Distribusi alat, obat dan kontrasepsi KB tepat waktu di setiap faskes dan desa sehingga memudahkan pasangan usia subur untuk ber-KB
 - Adanya bhakti sosial pelayanan keluarga berencana yang mana kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk mengikuti program KB seperti pemasangan Implant dan IUD secara gratis
 - Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi KB
 - Adanya kegiatan bhakti sosial PKK dan TNI dalam Program KKBPK
- c) Target persentase masyarakat desa yang berpartisipasi dalam program KKBPK tahun 2021 sebesar 99,80% , dan dari kinerja sudah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :
 - Adanya kelompok kegiatan (Poktan) BKB , BKL , BKR dan UPPKS dalam program KKBPK
 - Pembinaan Kampung KB di 24 desa se kab. Tapin
 - Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD yang ada di setiap desa

Solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan mengikuti sosialisasi maupun pelatihan terkait dengan pelaksanaan kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan .
2. Mengusulkan penambahan pegawai baru karena setiap bidang tidak ada memiliki staf sehingga bekerja jadi sedikit terhambat .dan juga pengusulan untuk penyuluh KB ke BKKBN Provinsi karena untuk penyuluh KB di kabupaten Tapin masih sangat kurang, dimana pada tahun 2021 jumlah penyuluh KB hanyar berjumlah 24 orang, sedangkan desa yang harus dilayani berjumlah 131desa.
3. Melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat serta dengan melakukan sosialisasi mengenai pelayanan – pelayanan untuk MKJP ke daerah – daerah terpencil.
4. Meningkatkan kerjasama dengan sector- sector terkait seperti KUA, Departemen Agama , TNI, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Rumah sakit , Ikatan Bidan Indonesia mengenai program-program yang dilaksanakan BKKBN.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Selama Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kab. Tapin melakukan berbagai Upaya efisiensi antara lain :

a. Sumberdaya Manusia (SDM)

No.	Sekretariat/Bidang	Sekretaris/ Kabid	Subag/ Subid	Tenaga Pelaksana	JML
1	Sekretariat	1	2	3	6
2	Bidang KB	1	3	1	5
3	Bidang KS	1	3	0	4
4	Bidang Dal,Duk,Luh	1	3	0	4
Jumlah		4	11	4	19
PKB/ PLKB					24

Sumberdaya manusia yang digunakan dengan melihat dari tabel diatas masih sangat kekurangan pegawai yang ada diDinas pengendalian penduduk dan kb terutama staf dan juga untuk penyuluh Keluarga Berencana masih sangat jauh kekurangan pegawai karena setiap kecamatan hanyar ada 1 atau 2 penyuluh keluarga

berencana .sehingga kegiatan yang dilaksanakan masih belum bisa dikerjakan secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap capaian penyerapan anggaran.

Upaya – upaya efisiensi yang digunakan antara lain dengan mengangkat tenaga kontrak sebagai pengganti Staf sehingga mereka bisa membantu untyk memaksimalkan pekerjaan – pekerjaan dan juga membantu dalam penggunaan aplikasi berbasis web guna menunjang peningkatan kinerja.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 10.174.271.476,- dan terserap sebesar Rp. 8.898.828.028,0- atau sebesar 87,46%.

3.1.6. Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2021 dapat dilihat dari Program – Program yang antara lain :

Capaian Indikator Kinerja Program Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapin

1. Capaian Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana

Capaian Kinerja (Esselon III)						
A	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Persentase peserta KB aktif MKJP	14%	13,55%	96,79%

Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Pengelolaan dan Distribusi Alkon)						
	2	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Ketersediaan Alat obat kontrasepsi (Alokon) disetiap lini	Persentase alat obat kontrasepsi (Alokon) yang tersedia	65%	21,77%	33,49 %
			Persentase alat , obat dan kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke sasaran tepat waktu	85%	78,88%	92,8%
Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Pelayanan KB)						
	3	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat	Jumlah Alat Kontrasepsi yang terpasang (aks)	978 Aks	978 Aks	100%
			Jumlah MOP/MOW yang dilaksanakan	4 Aks	2 Aks	50%
Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Pembinaan Kesertaan KB)						
	4	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Terbinanya Peserta KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%	94%	110 %

Indikator Persentase Peserta KB aktif MKJP sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar 96,79 % yang mana pemakaian KB MKJP mengalami

peningkatan, dikarenakan banyaknya kegiatan –kegiatan pelayanan Kb baik khususnya pemasangan Implant yang sudah dilaksanakan di daerah-daerah terpencil yang bekerjasama dengan Bidan-Bidan desa . Sehingga Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal ,Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB /Petugas lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat, obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah kabupaten kota serta Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dapat terlaksana dengan baik.

Indikator Kinerja Kasi Pengelolaan dan distribusi alokon adalah Persentase Alat Obat Kontrasepsi yang tersedia dengan realisasi 33,49 % dan Persentase capaian alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan kesasaran tepat waktu sebesar 92,8% yang berarti Pendistribusian Alokon ke fasilitas-fasilitas kesehatan berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi permintaan alat, obat kontrasepsi yang ada di setiap fasilitas kesehatan di kab. Tapin.dengan sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian alat, obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.

Indikator kinerja Kasi Pengelolaan dan Distribusi alokon dengan Jumlah alat kontrasepsi yang terpasang dengan realisasi 100% dan capaian Jumlah MOW/MOP yang dilaksanakan sebesar 50% . sehingga pemasangan dan pelepasan implant dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan dan untuk MOP/MOW kami masih kesulitan dalam mencari akseptor yang mau mengikuti MKJP dengan metode ini. Dengan sub kegiatan penddukung antara lain Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaring dan jejaringnya serta Dukungan Operasional pelayanan KB bergerak sehingga kedepannya diharapkan untuk MKJP dengan metode medis operasi banyak diminati oleh masyarakat.

Indikator Kinerja Kasi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan persentase Akseptor KB yang dibina dengan realisasi sebesar 110, 59%, sehingga akseptor KB yang dibina mengalami peningkatan dari target . yang mana didukung dengan adanya kerjasama antar lintas sector dan mitra kerja . dengan sub kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan metode kotrasepsi jangka panjang(MKJP), Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

2. Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Capaian Kinerja (Esselon III)						
A	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Meningkatnya Kampung KB yang aktif	Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	40%	96%	240%
	2	Tersedianya data dan Informasi keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	75%	100%	133,33%
	3	Menurunnya Angka kelahiran total	Agka kelahiran Total (TFR) per WUS(15-49 tahun)	2,09	2,26	92,48%
Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Advokasi dan Penggerakan)						
	2	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Partisipasi Mitra Kerja /Lintas Sektor dalam Pembinaan Kampung KB	Persentase Mitra Kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%	96%	137,142 %

Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Penyuluhan pendayagunaan lini lapangan dan kader KB)						
	3	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Terlaksananya Pembinaan Lini lapangan , kader KB dan sekolah	Jumlah petugas lini Lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK(org)	25	31	124%
			Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2	6	300%
			Jumah kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK	273	287	105%
Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga)						
	4	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Ketersediaan Data KKBPK	Jumlah data basis KKBPK yang tersedia (bh)	60%	60%	100 %
			Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK (bh)	36	43	119%

Indikator Persentase kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar 240

% yang mana banyak kegiatan – kegiatan kampung keluarga berkualitas (KB) yang telah dilaksanakan disetiap dikecamatan didesa-desa sampai terpencil. Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan capaian 133,34% , sehingga target yang diharapkan dapat terpenuhi dan banyak data yang dimanfaatkan oleh mitra kerja serta Angka kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49) tahun dengan capaian 92,48% sehingga target yang diharapkan tercapai dengan baik. Sehingga Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota dapat terlaksana dengan baik.

Indikator Kinerja kasi Advokasi dan Penggerakan adalah Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK dengan realisasi 137,14 % sehingga mitra kerja yang ikut dalam berpartisipasi dalam program KKBPK semakin meningkat dan diharapkan dengan mitra kerja yang meningkat program KKBPK dapat berjalan semakin baik. .dengan sub kegiatan Advokasi , sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/Mts , Jalur Non formal dan Informal, Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan serta membentuk Rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK disektor lain.

Indikator kinerja Jumlah Petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK dengan capaian sebesar 124% ,sehingga semua PKB/PLKB yang ada di kabupaten Tapin mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan wawasan lebih luas. capaian Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan sebesar 300%, dari target 2 sekolahan tercapai 6 sekolahan yang dapat diberikan sosialisasi mengenai Program KKBPK yang mana dimana pandemic covid -19 sangat kesulitan dalam melakukan tatap muka . dan Jumlah kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK dengan capaian sebesar 105% sehingga dengan pelaksanaan pelatihan diharapkan pengetahuan dan wawasan mengenai program KKBPK bagi kader KB dapat bertambah . dengan Sub kegiatan Promosi dan KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang dan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB .

Indikator Kinerja Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dengan Jumlah data basis KKBPK yang tersedia dengan realisasi sebesar 100%, serta realisasi jumlah stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK sebesar 119%. Sehingga data – data program KKBPK dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh mitra kerja dan stakeholder dalam pelaksanaan program KKBPK . dengan sub kegiatan Penyusunan profil kependudukan , keluarga berencana dan pembangunan keluarga, Dukungan pelaksanaan survey/Pendataan Indeks pembangunan berwawasan kependudukan, Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga , Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Capaian Kinerja (Esselon III)						
A	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Meningkatnya Partisipasi kelompok masyarakat dalam pembinaan keluarga (UPPKS, BKB, BKL, BKR)	Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	92,09%	93,57%	101,61%
			Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB	83,98%	70,58%	84,04%
			Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL	73,61%	92,15%	125,19%

			Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIKR) yang aktif	68,02%	90,23%	132,65%
			Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam bina keluarga remaja	92,36%	92,63%	100,29 %
Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Pemberdayaan keluarga sejahtera)						
	2	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan UPPKS	Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (PPKS/Kel)	25	0	0
Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia)						
	3	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	1	Terlaksananya Pembinaan Kelompok kegiatan (BKB dan BKL)	Jumlah BKB dan BKL yang terbina	152	140	92,11%

			Jumlah BKB dan BKL yang mengikuti lomba	24	23	95,83%
Capaian Kinerja Esselon IV (Kasi Bina Ketahanan Remaja)						
4	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan(BKB dan PIK R)	Jumlah lomba poktan PIK remaja , kelompok dan kader BKR	24	16	66,67 %	
		Jumlah PIK Remaja Jalur Pendidikan (Kel.)	15	6	40%	
		Jumlah PIK Remaja jamlur Masyarakat (Kel.)	25	23	92%	

Indikator Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai sebesar 101,61, Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB dengan capaian sebesar 84,04% , Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL capaian realisasi sebesar 125,19%, Persentase Kelompok Pusat Informasi dan konseling Remaja (PIK-R) yang aktif dengan capaian 132,65% dan Persentase keluarga ber- KB yang aktif dalam bina keluarga remaja dengan realisasi 100,29% , sehingga masyarakat / kader yang aktif dalam , BKB, BKL, PIK-R dan BKR secara tidak langsung dapat mengikuti program KB sehingga persentase pemakaian Alokon dapat meningkat Sehingga Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat terlaksana dengan baik.

Indikator Kinerja Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar Produk peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan realisasi 0 % , dikarenakan dalam 2 tahun terakhir (Tahun 2020 dan 2021) selama Pandemi Covid -19 Untuk UPPKS binaan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak ada mengikut sertakan dalam gelaran produk baik dalam Provinsi maupun luar provinsi .dengan sub kegiatan yang mendukung Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS) serta Promosi dan Sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja dapat berjalan dengan baik.

Indikator kinerja Kasi Bina Ketahanan keluarga Balita, Anak dan Lansia dengan Jumlah BKB dan BKL yang terbina dengan capaian sebesar 92,11% , dan Jumlah BKB dan BKL yang mengikuti lomba dengan capaian 95,83 % sehingga tercapainya target dari pembinaan keluarga BKB dan BKL dalam program KKBPK dapat berjalan dengan lancar baik dari segi pembinaan BKB dan BKL serta kader BKB dan BKL yang mengikuti lomba . dengan Sub kegiatan Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB , BKR, PIK-R , BKL , dan UPPKS dan pemberdayaan ekonnomi keluarga) seta Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) dapat terlaksana dengan baik.

Indikator Kinerja Kasi Bina Ketahanan Remaja dengan Jumlah lomba poktan PIK Remaja , Kelompok dan Kader BKR dengan realisasi sebesar 66,67%, serta realisasi jumlah PIK Remaja jalur Pendidikan sebesar 40%. Dan Jumlah PIK Remaja Jalur masyarakat dengan capaian sebesar 92%. Diharapkan kedepannya agar pembinaan kelompok kegiatan baik Bina Keluarga Remaja (BKR) maupun Pusat Informasi Konseling Remaja selalu dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya bagi remaja di kabupaten Tapin dalam program KKBPK . dengan sub kegiatan Orientasi /pelatihan teknis pelaksana /kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS ,PIK –R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga /UPPKS serta Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS) dapat dilaksanakan dengan baik.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan SAP (Standard Akuntansi Pemerintah) Pagu Anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2021 sebesar Rp. 10.174.271.476,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 8.898.828.028,- atau 87,46%. Dengan rincian sebagai berikut :

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.621.067.476	3.446.384.983	95,18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.673.665.176	2.652.328.515	99,20
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.668.765.176	2.647.428.515	99,20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	2.450.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.450.000	2.450.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	598.112.700	478.231.640	79,96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.008.400	4.008.400	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.030.400	29.030.400	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.126.400	50.021.400	99,79
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.679.200	11.334.200	97,05
Penyediaan Bahan/Material	4.015.300	-	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000	5.280.000	64
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491.003.000	378.557.240	77,10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.483.200	24.973.900	84,71
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.854.600	11.833.900	99,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.628.600	13.140.000	74,54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.715.600	162.161.759	85,03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.531.200	1.531.200	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.600.000	63.430.559	80,70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.584.400	97.200.000	87,90

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.090.800	123.689.169	99,68
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.990.800	118.629.169	99,70
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.060.000	99,22
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	406.703.200	383.556.600	94,31
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	271.523.200	268.415.200	98,86
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	240.550.100	238.372.100	99,09
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.119.200	23.119.200	100
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	7.853.900	6.923.900	88,16
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	135.180.000	115.141.400	85,18
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900	5.145.000	67,13
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	59.750.100	57.040.100	95,46
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	39.965.200	29.719.100	74,36
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6.411.000	5.002.000	78,02
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	21.389.800	18.235.200	85,25
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.945.142.800	4.196.240.545	84,86
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.510.835.100	1.320.823.185	87,42
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	50.850.000	50.548.200	99,41
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	327.525.000	323.302.612	98,71
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.913.100	-	0
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	174.219.000	166.088.400	95,33
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	883.728.000	719.241.573	81,39
Pengendalian Program KKBPK	71.600.000	61.642.400	86,09

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.937.567.000	1.890.320.760	97,56
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	27.850.000	26.250.000	94,25
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.261.717.000	1.216.470.760	96,41
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	648.000.000	647.600.000	99,94
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	813.034.200	448.919.400	55,22
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000	29.999.700	99,999
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28.207.900	27.957.900	99,11
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	35.385.000	22.325.000	63,09
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.849.900	10.757.200	60,26
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	627.025.000	300.570.000	47,94
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	74.566.400	57.309.600	76,86
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	683.706.500	536.177.200	78,42
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	33.976.600	12.447.200	36,63
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	38.689.900	6.900.000	17,83
Pembinaan Terpadu Kampung KB	611.040.000	516.830.000	84,58
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.201.358.000	872.645.900	72,64
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.169.050.700	848.837.600	72,61
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	97.630.100	86.776.000	88,88
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	609.500.000	368.035.000	60,38

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.525.000	31.906.000	78,73
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	252.619.800	251.430.000	99,53
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	125.760.900	77.948.000	61,98
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	17.121.000	9.750.000	56,95
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	25.893.900	22.992.600	88,80
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	32.307.300	23.808.300	73,69
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.237.800	17.645.500	87,19
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.479.900	-	0
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	6.589.600	6.162.800	93,52
TOTAL	10.174.271.476	8.898.828.028	87,46

Secara umum realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kab. Tapin sampai 31 Desember 2021 mencapai 87,46 % , Dari 4 (empat) program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 (empat) Program diantaranya : 1)program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.621.067.476 realisasi Rp. 3.446.384.983 atau 95,18% , 2) Program pengendalian Penduduk dengan Pagu anggaran Rp. 406.703.200 realisasi Rp. 383.556.600 atau 94,31 % , 3) Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan pagu anggaran Rp. 4.945.142.800 realisasi Rp. 4.196.240.545 atau 84,86% dan 4) Program Pembedayaan dan Peningkatan

keluarga sejahtera dengan pagu anggaran Rp. 1.201.358.000 realisasi Rp. 872.645.900 atau 72,64% .

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan memberi manfaat untuk mendorong instansi tersebut dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021.

LKIP Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin merupakan pengukuran dan penilaian kinerja serta memberikan sebuah gambaran transparansi dan akuntabilitas tentang berbagai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dalam mewujudkan visi misi melalui berbagai kegiatan pembangunan sesuai urusan wajib bukan pelayanan dasar. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin telah melakukan realisasi belanja pada tahun 2021 dengan penyerapan anggaran kinerja realisasi anggaran sebesar 87,46%. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

A. Kesimpulan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan Persentase Capaian Kinerja di atas 100% atau Baik sekali (BS) sebanyak 4 IKU
2. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 DPPKB Kabupaten Tapin adalah sebesar 123,79%

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra DPPKB Kabupaten Tapin

Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan

Secara umum realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kab. Tapin sampai 31 Desember 2021 mencapai 87,46 % , Dari 4 (empat) program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 (empat) Program diantaranya : 1) program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.621.067.476 realisasi Rp. 3.446.384.983 atau 95,18% , 2) Program pengendalian Penduduk dengan Pagu anggaran Rp. 406.703.200 realisasi Rp. 383.556.600 atau 94,31 % , 3) Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan pagu anggaran Rp. 4.945.142.800 realisasi Rp. 4.196.240.545 atau 84,86% dan 4) Program Pembedayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera dengan pagu anggaran Rp. 1.201.358.000 realisasi Rp. 872.645.900 atau 72,64% .

B. Saran – saran

Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur dan terpenuhinya Sarana/Prasarana pendukung.

Capaian kinerja hendaknya lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya, sehingga akan terwujud Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tertib, transparan, dan memiliki akuntabilitas sesuai apa yang telah direncanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Dalam ketepatan pelaksanaan anggaran, hendaknya dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan hanya dikarenakan sempitnya waktu pelaksanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik.

Rantau, Februari 2022

· Kepala



UJAH LUL JANA H.S.Pd.MM

NIP.19641012 198305 2 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

No	Kinerja Utama (Tujuan / Sasaran)	No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan /Cara Perhitungan IKU	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kesertaan Ber -KB	1	Persentase Peningkatan Kesertaan ber - KB (CPR)	$(\sum \text{Peserta KB aktif}) / (\sum \text{PUS}) * 100\%$ alasan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB	DPPKB	DPPKB
		2	Persentase Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	$(\sum \text{IAT} + \text{TIAL}) / (\sum \text{PUS}) * 100\%$ alasan : Agar PUS yang masih belum ber_KB dapat terlayani dengan tepat	DPPKB	DPPKB
2	Terkendalinya Angka Kelahiran	1	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	$(\sum \text{Anak PUS}) / (\sum \text{PUS}) * 100$ alasan : Agar jumlah anak didalam keluarga bisa dikendalikan	DPPKB	DPPKB
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	1	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	Rumus : $(\sum \text{Semua Kegiatan KKBPK}) / (\sum \text{kegiatan yang dilaksanakan KKBPK}) * 100\%$, Alasan : Meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	DPPKB	DPPKB

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Fax (0517)31510 Kode Pos 71111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN**

NOMOR : 800/ 026 /DPPKB/2021
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) 2021,
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021, dimaksud pada dictum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : Januari 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



NOOR IFANSYAH, SKM, MS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198903 1 012

LAMPIRAN I**NOMOR : 800/026/DPPKB/2021****TANGGAL : Januari 2021****PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .**

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

I. TIM PENGARAH	
Pengarah	: KEPALA DPPKB
Penanggung Jawab	: SEKRETARIS DPPKB
Ketua	: KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPPKB
Sekretaris	: KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Anggota	: 1. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA
	2. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
	3. KASI. ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
	4. KASI. PENYULUHAN, PENDAYAGUNAAN LINI LAPANGAN DAN KADER KB
	5. KASI. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA
	6. KASI. PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ALAT, OBAT, KONTRASEPSI
	7. KASI. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
	8. KASI. PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA
	9. KASI. PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
	10. KASI. BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANJUT USIA
	11. KASI. BINA KETAHANAN REMAJA
Kesekretariatan	: KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



NOOR IFANSYAH, SKM, MS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198903 1 012

LAMPIRAN II

NOMOR : 800/ 026 /DPPKB/2021

TANGGAL : JANUARI 2021

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021

**RENCANA TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

1. Pengarah, yaitu :

- a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah (Lkip) Tahun 2021, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2021;
- b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja laporan kinerja instansi pemerintah (Lkip) tahun 2021;
- c. Menyampaikan laporan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (Lkip) Tahun 2021 kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

2. Penanggung Jawab :

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyusun Laporan kinerja instansi pemerintah (Lkip) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah (Lkip) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Lkip) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Lkip) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

4. Anggota

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkip) Tahun lalu;
- b. Melakukan analisis Laporan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- c. Melakukan telaahan terhadap indikator di perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



NOOR IFANSYAH, SKM, MS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660723 198903 1 012

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan No. 7 Rantau Telp.(0517) 31052 Kode Pos 71111

email : bppkb.tapin@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 074 /DPPKB/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 03 Oktober 2016;
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dikum KESATU merupakan target pencapaian kinerja Tahun 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilaksanakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 22 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN,



HJ. AHLUL JANA H, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641012 198305 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 074 /DPPKB/2021
TANGGAL : 22 OKTOBER 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

No	Kinerja Utama (Tujuan / Sasaran)	No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan /Cara Perhitungan IKU	Target 2021
1	Meningkatnya Kesertaan Ber - KB	1	Persentase Peningkatan Kesertaan ber - KB (CPR)	Rumus : (\sum Peserta KB aktif) / (\sum PUS) * 100% , makna : pasangan usia subur yang aktif dalam menggunakan alat kontrasepsi alasan : Mengetahui capaian penggunaan alat kontrsepsi KB	83,20%
		2	Persentase Pasangan Usia subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Rumus : (\sum PUS IAT + TIAL) / (\sum PUS) * 100 , makna : pasangan usia subur yang tidak ber-KB karena alasan ingin punya anak ditunda dan tidak ingin anak lagi. alasan : Mengurangi PUS yang tidak ber-KB	9,82%
2	Terkendalnya Angka Kelahiran	1	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	Rumus : (\sum Anak PUS) / (\sum PUS) * 1000 , makna : Jumlah anak yang dimiliki dalam pasagan usia subur . alasan : mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga .	2,16 Anak

3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	1	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	Rumus : (\sum Semua Kegiatan KKBPK) / (\sum kegiatan yang dilaksanakan KKBPK) *100% Alasan : Meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	77%
---	--	---	--	---	-----



HJ. AHLUL JANA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641012 198305 2 002

LAMPIRAN 3

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H.M. Arifin Arpan, MM**

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Drs.H.M.Arifin Arpan,MM

Rantau, Desember 2021
Pihak Pertama,



**Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641012 198305 2 002**

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kab. Tapin

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kesertaan ber-KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	%	83,20	85,21
		Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	9,82	7,22
2	Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur	Anak	2,16	1,7
3	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	%	77	99,80

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.435.505.835
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 229.503.200
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 362.603.800
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 606.858.000
JUMLAH		Rp. 4.634.470.835



Pihak Kedua,

Drs.H.M.Arifin Arpan,MM



Rantau, Desember 2021

Pihak Pertama,

Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641012 198305 2 002

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Sarana dan Prasarana administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100%
		Persentase Aset yang tercatat	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Pengurusan administrasi perkantoran	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai LAKIP yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten	77%	
4	Meningkatkan Kualitas capaian Kinerja Keuangan	Persentase Penyerapan anggaran SOPD	100%	87,46

Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.432.365.035
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	588.309.800
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.024.600
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.715.600
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.090.800
JUMLAH		3.435.505.835

Rantau, Desember 2021

Sekretaris DPPKB,



Hj. Abbi Janah, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641012 198305 2 002

Hj. Nurul Hidayah, S.ST, M.Kes
NIP. 19750511 200212 2 006

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan kinerja SOPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	14 Laporan	14 Laporan
2	Menyusun Perencanaan Administrasi Keuangan SOPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan secara berkala	2 Laporan	2 Laporan

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.450.000
JUMLAH		9.900.000

Rantau, Desember 2021

Sekretaris DPPKB,

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



Hj. Nurul Hidayah, S.ST, M.Kes
NIP. 19750511 200212 2 006



Mayasari, SE
NIP. 19820525 201001 2 023

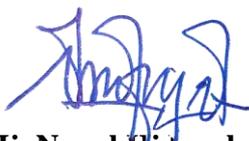
**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. TAPIN**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Merencanakan dan Mengadakan sarana dan Prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen terkait sarana dan Prasarana	1 Dok	1 Dok
		Jumlah Aset yang tercatat	1 Dok	1 Dok
2	Menyusun data kepegawaian ,Evaluasi, serta administrasi kepegawaian SOPD	Jumlah Pegawai yang administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib	20 Pegawai	20 Pegawai

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.008.400
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.030.400
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.273.000
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.396.000
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.628.600
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.531.200
8.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.584.400
9.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000
JUMLAH		726.552.000

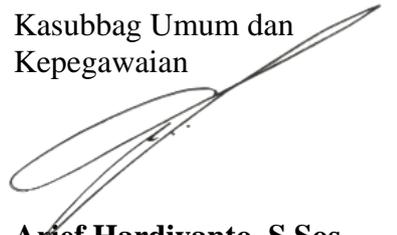
Sekretaris DPPKB,



Hj. Nurul Hidayah, S.ST, M.Kes
NIP. 19750511 200212 2 006

Rantau, Desember 2021

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Arief Hardiyanto, S.Sos
NIP. 19790511 199803 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kampung KB yang aktif	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	40%	96
2	Tersedianya data dan Informasi Keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	75%	100
3	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,09	2,26

Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	94.323.200
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	135.180.000
JUMLAH		229.503.200



Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641012 198305 2 002

Rantau, Desember 2021

Bidang Pengendalian Penduduk ,
Penyuluhan dan Penggerakan,

Sadiyah.S.Sos.M.AP
NIP. 19670526 198902 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan

Unit Kerja : Kasi Advokasi dan Penggerakan

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partisipasi mitra kerja /lintas sektor dalam pembinaan kampung KB	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%	96

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.119.200
2.	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	7.853.900
3.	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	59.750.100
JUMLAH		90.723.200

Rantau, Desember 2021

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,

Kasi Advokasi dan Penggerakan



Sadiyah,S.Sos.M.AP
NIP. 19670526 198902 2 002



KASTALANI, AMKL
NIP. 19770430 200701 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan

Unit Kerja : Kasi Luh Pendayagunaan Lini Lapangan dan kader KB

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan Lini Lapangan, Kader KB dan Sekolah	Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK (org)	25	31
		Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2	6
		Jumlah Kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK	273	287

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2.913.100
2.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	27.850.000
JUMLAH		30.763.100

Rantau, Desember 2021

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,



Sadiyah,S.Sos.M.AP

NIP. 19670526 198902 2 002

Kasi Luh Pendayagunaan Lini Lapangan dan Kader KB



Tini Zaitun,S.Sos

NIP.19640215 198703 2 012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan
Unit Kerja : Kasi Dal Duk dan Informasi Keluarga
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketersediaan data KKBPK	Jumlah data basis KKBPK yang tersedia (bh)	60	60
		Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK (bh)	36	43

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	63,350,100
2.	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.900
3.	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	39,965,200
4.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6,411,000
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	21,389,800
JUMLAH		Rp. 41.750.000,-

Kabid Dal Duk,Luh dan Penggerakan,



Sadiyah,S.Sos.M.AP
NIP. 19670526 198902 2 002

Rantau, Desember 2021

Kasi Dal Duk dan Informasi Keluarga,



ROTUA THERESIA S, S.Sos
NIP. 19830708 201402 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	8,87%	13,55%

Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	112.363.100
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	27.850.000
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	149.724.200
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	72.666.500
JUMLAH		362.603.800



Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641012 198305 2 002

Rantau, Desember 2021

Kabid Keluarga Berencana,

Hj. Mastika Murni, SE, MM
NIP. 19720205 199303 2 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana

Unit Kerja : Kasi Pengelolaan dan Distribusi Alokon

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketersediaan Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) di setiap lini	Persentase Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) yang tersedia (%)	65%	21,77%
		Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85%	78,88%

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000
JUMLAH		30.000.000

Rantau, Desember 2021

Kabid Keluarga Berencana,



Hj. Mastika Murni, SE, MM
NIP. 19720205 199303 2 006

Kasi Pengelolaan dan Distribusi Alokon,



Pathiah, SKM
NIP. 19660303 199103 2 017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana

Unit Kerja : Kasi Pelayanan KB

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat	Jumlah Alat Kontrsepsi yang terpasang (Aks)	978 Aks	978 Aks
		Jumlah MOW/MOP yang dilaksanakan	4 Aks	2 Aks

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian Program KKBPK	71.600.000
2.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.849.900
3.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	74.566.400
JUMLAH		164.016.300

Rantau, Desember 2021

Kabid Keluarga Berencana,



Hj. Mastika Murni, SE, MM
NIP. 19720205 199303 2 006

Kasi Pelayanan KB,



Yoyok Timbul Suraryo, SKM
NIP. 19700310 199403 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Keluarga Berencana
Unit Kerja : Kasi Pembinaan Kesertaan KB
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terbinanya Peserta KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%	94%

Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	37.850.000
2.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27.307.900
3.	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	33.976.600
4.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	38.689.900
JUMLAH		137.824.400

Rantau, Desember 2021

Kabid Keluarga Berencana,



Hj. Mastika Murni, SE, MM
NIP. 19720205 199303 2 006

Kasi Pembinaan Kesertaan KB,



YUNITA AFRINA, SST
NIP. 19860208 200904 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Partisipasi kelompok Masyarakat dalam pembinaan Keluarga (UPPKS, BKB, BKL, BKR)	Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	92,09%	93,57
		Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB	83,98%	70,58
		Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL	73,61%	92,15
		Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	68,02%	90,23
		Persentase keluarga ber-KB aktif dalam bina keluarga remaja	92,36%	92,63

Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	574.550.700
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	32.307.300
JUMLAH		606.858.000



Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641012 198305 2 002

Rantau, Desember 2021

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Meriyati Herliana, SKM
NIP. 19640219 198712 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Unit Kerja : Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan UPPKS	Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS)(kel.)	25	0

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	24.993.900
2.	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.237.800
3.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.479.900
4.	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	6.589.600
JUMLAH		57.301.200

Rantau, Desember 2021

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,



Meriyati Herliana, SKM
 NIP. 19640219 198712 2 002

Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera,



Norhayaton, SE
 NIP. 19800504 200701 2 017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Unit Kerja : Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan (BKB dan BKL)	Jumlah BKB dan BKL yang terbina	152	140
		Jumlah BKB, BKL yang mengikuti Lomba	24	23

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	112.300.100
2.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240.199.800
3.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	23.271.000
JUMLAH		375.770.900

Rantau, Desember 2021

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,



Meriyati Herliana, SKM
NIP. 19640219 198712 2 002

Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia,



Ir. MARIA
NIP. 19650512 1995032002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

Unit Organisasi : Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Unit Kerja : Kasi Bina Ketahanan Remaja

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan (BKR dan PIK R)	Jumlah lomba Poktan PIK Remaja , Kelompok dan kader BKR	24	16
		Jumlah PIK Remaja Jalur Pendidikan (kel.)	15	6
		Jumlah PIK Remaja Jalur Masyarakat (Kel.)	25.	23

Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.525.000
2.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	133.260.900
JUMLAH		173.785.900

Rantau, Desember 2021

Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Kasi Bina Ketahanan Remaja,




Meriyati Herliana, SKM
NIP. 19640219 198712 2 002

Jumaitini
NIP. 19680510 198903 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Analisis Keluarga Berencana
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Uraian Tugas	Target	Realisasi			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membuat Jadwal kegiatan sebagai pedoman dalam rencana kegiatan	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen
2.	Menganalisis dan menyajikan data mengenai pemakaian kontrasepsi serta kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	12 Dokumen
3.	Membantu melaksanakan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	3 Kegiatan	-	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan
4.	Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan/penyuluhan terhadap pemakaian alat kontrasepsi dalam melaksanakan program Keluarga Berencana	36 Kegiatan	9 Kegiatan	18 Kegiatan	27 Kegiatan	36 Kegiatan
5.	Membantu memantau dan menyediakan ketersediaan obat efek samping pelayanan KB	36 Kegiatan	9 Kegiatan	18 Kegiatan	27 Kegiatan	36 Kegiatan
6.	Menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kontrasepsi serta kesehatan reproduksi	3 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan
7.	Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap atasan	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan
8.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan	12 Paket	3 Paket	6 Paket	9 Paket	12 Paket

Pihak Kedua

Kasi Penyuluhan, Pendayagunaan Lini lapangan dan kader KB,



Yoyok Timbul Suraryo, SKM

NIP.19700310 199403 1 008

Rantau, Desember 2021

Pihak Pertama

Analisis Keluarga Berencana



Juwita Sari, SKM

NIP. 19941004 202012 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Penata keuangan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Uraian tugas	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Membuat SPP untuk diajukan ke PPK	75 Berkas	-	-	50 Berkas	75 Berkas
2.	Membuat Bahan Register Penutupan Kas	6 Berkas	1 Berkas	2 Berkas	1 Berkas	6 Berkas
3.	Membuat Bendahara Pengeluaran Menyusun Surat Pertanggung jawaban (SPJ)	650 Berkas	-	-	-	650 Berkas
4.	Membantu Bendahara Pengeluaran Melakukan Penginputan SPJ pada Aplikasi SIMDA Keuangan	500 Berkas	100 Berkas	200 Berkas	300 Berkas	500 Berkas
5.	Membantu Register SPP (UP, GU, TU, LS dan Nihil)	85 Dokumen	25 Dokumen	35 Dokumen	65 Dokumen	85 Dokumen
6.	Membantu Bendahara Pengeluaran melakukan Penginputan Pajak pada Aplikasi SIMDA Keuangan	550 Dokumen	130 Dokumen	240 Dokumen	370 Dokumen	550 Dokumen
7.	Menyiapkan Bahan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulanan Berikutnya	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
8.	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	65 Dokumen	10 Dokumen	21 Dokumen	40 Dokumen	65 Dokumen

Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



Mayasari, SE
 NIP. 19820525 201001 2 023

Rantau, Desember 2021

Pihak Pertama
Penata Keuangan,



Najmi Az Zahra Balela, S.Ak
 NIP. 19960413 202012 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Bendahara Pengeluaran
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Uraian tugas	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menyiapkan dan melakukan penginputan SPJ	3500 Berkas	78 Berkas	592 Berkas	1866 Berkas	3740 Berkas
2.	Menyiapkan dan Penyampaian Gaji dan Tunjangan PNS	200 Berkas	7 Berkas	15 Berkas	26 Berkas	50 Berkas
3.	Menyiapkan dan Menyampaikan SPP (GU, TU, LS dan NIHIL)	200 Berkas	10 Berkas	24 Berkas	63 Berkas	139 Berkas
4.	Menyiapkan Kartu Kendali kegiatan per bulan	50 Berkas	10 Berkas	20 Berkas	30 Berkas	40 Berkas
5.	Menyiapkan dan melakukan input penyeteroran Pajak	2500 Berkas	28 Berkas	394 Berkas	1325 Berkas	3108 Berkas
6.	Menyiapkan Buku Kas Umum (BKU)	12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan
7.	Menyiapkan kelengkapan dan Pemeriksa Keuangan	4 Triwulan	1 Triwulan	2 Triwulan	3 Triwulan	4 Triwulan
8.	Menyiapkan dan merapikan berkas keuangan	12 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan
9.	Menyampaikan dan menginput PINBUK SPJ	3500 Berkas	50 Berkas	79 Berkas	1866 Berkas	3740 Berkas

Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan,



Mayasari, SE

NIP. 19820525 201001 2 023

Rantau, Desember 2021
Pihak Pertama
Bendahara Pengeluaran,



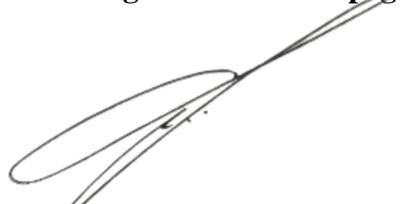
Mastuti, S.AP

NIP. 19810109 201212 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Uraian tugas	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menyiapkan dan menyetik Surat Menyurat DPPKB	55 Surat	-	20 Surat	30 Surat	55 Surat
2.	Menyetik Surat Keputusan, Telaahaan Staf	45 Naskah	-	12 Naskah	25 Naskah	45 Naskah
3.	Membuat KIB , KIR dan Buku Inventaris Ruangan	20 Berkas	-	-	-	20 Berkas
4.	Input Data Inventaris BMD baru DPPKB	86 Data	-	-	-	86 Data
5.	Membuat Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	6 Berkas	-	-	-	6 Berkas
6.	Membuat dan Merekap Barang Persediaan	12 Berkas	-	3 Berkas	9 Berkas	12 Berkas
7.	Membuat Stock Opname Barang Persediaan secara berkala	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan
8.	Menyiapkan berkas permohonan penghapusan barang BMP	1 Berkas	-	-	-	1 Berkas

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Arief Hardiyanto, S.Sos
 NIP. 19790511 199803 1 001

Rantau, Desember 2021
 Pihak Pertama
**Pengelola Pemanfaatan
 Barang Milik Daerah,**



SAIHUL
 NIP. 19810715 201212 1 005

LAMPIRAN 4

Eselon II

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Kesertaan ber – KB	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR) (%)	83,16%
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	9,84%
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur (Anak)	2,17 Anak
Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan	75%

Eselon III

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Pelayanan Sarana dan Prasarana administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%
	Persentase Aset yang tercatat	100%
	Persentase Pemenuhan Pengurusan administrasi perkantoran	100%
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai LAKIP yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten	75%
Meningkatkan Kualitas capaian Kinerja Keuangan	Persentase Penyerapan anggaran SOPD	100%

Eselon IV

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Merencanakan dan Mengadakan sarana dan Prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen terkait sarana dan Prasarana	1 Dok
	Jumlah Aset yang tercatat	1 Dok
Menyusun data kepegawaian ,Evaluasi, serta administrasi kepegawaian SOPD	Jumlah Pegawai yang administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib	17 Pegawai

Eselon IV

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Menyusun Perencanaan dan Pelaporan kinerja SOPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	14 Laporan
Menyusun Perencanaan Administrasi Keuangan SOPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan secara berkala	2 Laporan





Esselon III

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kampung KB yang aktif	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	35%
Tersedianya data dan Informasi Keluarga yang aktif dalam ber-KB	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	70%
Meningkatnya Jumlah sekolah yang dibina oleh program KKBPK	Persentase sekolah di kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan	70%

Esselon IV

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Partisipasi mitra kerja /lintas sektor dalam pembinaan kampung KB	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Pembinaan Lini Lapangan, Kader KB dan Sekolah	Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK (org)	25
	Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2
	Jumlah Kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPK	273

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Ketersediaan data KKBPK	Jumlah data basis KKBPK yang tersedia (bh)	60
	Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPK (bh)	36

Esselon III

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat mengikuti pelayanan kontrasepsi KB	Persentase Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,10%
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dalam Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	8,88%

Esselon IV

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Ketersediaan Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) di setiap lini	Persentase Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) yang tersedia (%)	65%
	Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi bagi masyarakat	Jumlah Alat Kontrasepsi yang terpasang (Aks)	250 Aks
	Jumlah MOW/MOP yang dilaksanakan	7 Aks

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terbinanya Peserta KB	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%

Esselon III

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Partisipasi kelompok Masyarakat dalam pembinaan Keluarga (UPPKS, BKB, BKL, BKR)	Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	92,07%
	Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB	83,93%
	Persentase Keluarga ber_KB yang aktif dalam BKL	72,11%
	Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	67,02%
	Persentase keluarga ber-KB aktif dalam bina keluarga remaja	92,28%

Esselon IV

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan UPPKS	Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (PPKS)(kel.)	25

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan (BKB dan BKL)	Jumlah BKB dan BKL yang terbina	152
	Jumlah BKB, BKL yang mengikuti Lomba	24

Kinerja	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan (BKR dan PIK R)	Jumlah lomba Poktan PIK Remaja , Kelompok dan kader BKR	24
	Jumlah PIK Remaja Jalur Pendidikan (kel.)	15
	Jumlah PIK Remaja Jalur Masyarakat (Kel.)	25.

LAMPIRAN 5

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Targer	Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terkendalinya Angka Kelahiran	Rasio Jumlah Anak dari Pasangan Usia Subur				2.16%	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif MKJP	8.87%	Rp 2,411,385,800			13.87%	13.55%	Bidang Keluarga Berencana
Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpebuhi (Unmeed Need)				9.82%	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	Rp 1,497,835,100	25%	50%	75%	100%	
	Persentase Peningkatan Kesertaan Ber-KB (CPR)				83.20%	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12 bln	Rp 37,850,000	3 bln	6 bln	9 bln	12 bln	
						Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kegiatan POKTAN menggunakan Media KIE untuk penanganan Stunting	21 Poktan	Rp 327,525,000					21 Poktan
						Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 bln	Rp 2,913,100	3 bln	6 bln	9 bln	12 bln	
						Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah kegiatan BOKB dan KIE Program Bangsa Kencana	12 bln	Rp 174,219,000					12 bln
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah pembinaan dan pelayanan bagi PUS, IMP, dan Kelompok KB di Balai Penyuluh KB Tingkat Kecamatan	12 Kec.	Rp 883,728,000					12 Kec.
						Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	774 Aks	Rp 71,600,000	0	0	711 Aks	774 Aks	
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	Rp 27,850,000	25%	50%	75%	100%	
						Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12 Bln	Rp 27,850,000	3 bln	6 bln	9 bln	12 bln	
						Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana dan prasarana Balai penyuluh KB untuk Pelayanan Kelompok Kegiatan, IMP dan calon Akseptor KB di Tingkat Kecamatan	12 bln	Rp 1,261,717,000					12 bln
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kegiatan pembinaan oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD terhadap calon akseptor KB	135 Desa	Rp 648,000,000					135 Desa
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 813,034,200	25%	50%	75%	100%	
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Bln	Rp 30,000,000	3 bln	6 bln	9 bln		
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 Bln	Rp 28,207,900	3 bln	6 bln	9 bln	12 Bln	
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pendistribusian alokan ke faskes	15 Faskes	Rp 35,385,000					15 Faskes

				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Aks	Rp	17,849,900	0 Aks	0 Aks	2 Aks	2 Aks		
				Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Dukungan Operasional KB dalam pelayanan calon akseptor KB	1010 Akseptor	Rp	627,025,000					300 Aks	
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	978 Aks	Rp	74,566,400	442 Aks	621 Aks	921 Aks	978 Aks		
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	Rp	72,666,500	25%	50%	75%	100%		
				Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12 bln	Rp	33,976,600	3 bln	6 bln	9 bln	12 bln		
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	12 bln	Rp	38,689,900	3 bln	6 bln	9 bln	12 bln		
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kegiatan kampung KB di Kabupaten Tapin	24 Desa Kampung KB	Rp	611,040,000					24 Desa Kampung KB	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	92.09%		Rp 1,201,358,000				93.56%	93.57%	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB	83.98%						71.82%	70.58%	
					Persentase Keluarga ber_KB yang aktif dalam BKL	73.61%						77.85%	92.15%	
					Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang	68.02%						87.72%	90.23%	
					Persentase keluarga ber-KB aktif dalam bina keluarga remaja	92.36%						84.98%	92.63%	
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Rp	1,169,050,700	25%	50%	75%	100%		
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	20 Keg	Rp	97,630,100	5 keg	10 Keg	14 Keg	18 Keg		
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam penanganan stunting tingkat Desa	10 Lokus	Rp	609,500,000					10 Lokus	
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Keg	Rp	40,525,000	0 kegiatan	0 kegiatan	1 Keg	1 Keg		

					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9 Bln	Rp	252,619,800	0 bin	6 bin	9 Bln	9 Bln	
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Keg	Rp	125,760,900	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	2 Kegiatan	
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Keg	Rp	17,121,000	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	4 Keg	
					Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	2 Keg	Rp	25,893,900	0 kegiatan	0 kegiatan	1 keg	2 Keg	
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Rp	32,307,300	25%	50%	75%	100%	
					Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Keg	Rp	20,237,800	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 keg	Rp	5,479,900	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	
					Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 keg	Rp	6,589,600	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persentase Kelompok Binaan KKBPK yang Menindaklanjuti Hasil Kegiatan			77%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2.09					2.28	2.26	Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan
						Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	75%	Rp	406,703,200			75%	100%	

					Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja	40%					33.33%	96%
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	Rp	271,523,200	25%	50%	75%	100%
				Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 keg	Rp	240,550,100	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 keg	Rp	23,119,200	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan
				Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 keg	Rp	7,853,900	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	Rp	135,180,000	25%	50%	75%	100%
				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 Keg		7,663,900	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 Kegiatan
				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	6 Keg		59,750,100	0 kegiatan	1 kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
				Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan		39,965,200	0 lap	0 lap	0 lap	1 lap
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Laporan		6,411,000	3 Lap	3 Lap	9 Lap	12 Lap
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	12 Laporan		21,389,800	3 Lap	3 Lap	9 Lap	12 Lap

Mengenalai :
Kepala LPPKB



H. Ahul Janah, S.Pd, M.Si
NIP. 19641012 198305 2 002

LAMPIRAN 6

CROSS CUTTING

MISI 1 RPJMD :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya manusia yang agamis sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing

Sasaran 2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

RSUD DS

1. Program Upaya Kesehatan masyarakat

Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Kesertaan ber-KB
2. Terkendalinya Angka Kelahiran

DINKES

1. Program Upaya Kesehatan masyarakat
2. Program Kesehatan Keluarga
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat



bppkb.tapin@gmail.com



[Bangga Kencana Tapin Channel](#)



[Banggakencana tapin](#)



[Bangga Kencana Tapin](#)

CROSS CUTTING

MISI 2 RPJMD :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari Desa

Sasaran 4 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran Strategis :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

DPMD



1. Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan



**DINAS
PUPR**

1. Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan dan Lingkungan



bppkb.tapin@gmail.com



[Bangga Kencana Tapin Channel](#)



[Banggakencana tapin](#)



[Bangga Kencana Tapin](#)

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor : 700/007/LHE.AKIP/INSP/2021
Tanggal 8 Juni 2021

O B R I K :

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB
KABUPATEN TAPIN**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon (0517) 31601

R A N T A U

Kode Pos 71111

Nomor : 700/007/LHE AKIP/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(Sistem AKIP) Tahun 2020

Rantau, 8 Juni 2021

KEPADA

YTH. Kepala DPPKB
Kabupaten Tapin

Di-

Rantau.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tapin Nomor : 094/035/Reg-Wil.III/INSP/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021 ; kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, memperoleh nilai sebesar **80,89** dengan kategori **A** yang berarti **Memuaskan**. Memuaskan memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel, dengan rincian sebagai berikut :

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,38	27,10
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,00	21,88
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,61	13,21
d.	Evaluasi Internal	10	7,18	6,92
e.	Capaian Kinerja	20	12,06	11,78
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,23	80,89
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

3. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Perencanaan Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang 27,10 dengan nilai sebesar **90,33** berkategori **AA** yang berarti implementasi Perencanaan Kinerja **Sangat Memuaskan** dan memiliki system manajemen kinerja yang sangat andal.

b. *Pengukuran Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang 21,88 dengan nilai sebesar **87,50** berkategori **A** yang berarti implementasi Pengukuran Kinerja **Memuaskan** , akuntabilitas kinerjanya baik memiliki system manajemen kinerja yang andal.

c. *Pelaporan Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 13,21 dengan nilai sebesar **88,07** berkategori **A** yang berarti implementasi Pelaporan Kinerja **Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

d. *Evaluasi Internal*

Diperoleh angka tertimbang sebesar 6,92 dengan nilai sebesar **69,22** berkategori **B** yang berarti Evaluasi Internal **Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik memiliki system yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

e. *Pencapaian Kinerja*

Diperoleh angka tertimbang 11,78 dengan nilai sebesar **59,91** berkategori **CC** yang berarti implementasi Pencapaian Kinerja **Cukup Baik**, Sistem dan tatanan dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja.

Saran

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dan ke depannya agar nilai yang diperoleh dapat dipertahankan.



Inspektur,

Unda Absori, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19700722 200501 1 013

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB KABUPATEN TAPIN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	90,33%	27,10	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	100,00%	10,00	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	100,00%	2,00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	100,00%	5,00	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1,00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	100,00%	3,00	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1,00	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	85,50%	17,10	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	95,00%	9,50	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK

14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	60,00%	3,60	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	87,50%	21,88	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	100,00%	5,00	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12,50	97,50%	12,19	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)		Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK

C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	88,07%	13,21	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	100,00%	3,00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	88,14%	6,61	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,67	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan dan dapat diverifikasi		B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	69,22%	6,92	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	89,00%	1,78	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,67	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	65,33%	3,27	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00	62,50%	1,88	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	58,91%	11,78	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	66,67%	5,00	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	135,63%	6,78	
4	Target dapat dicapai			0,50	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,50	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			1,97	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2,81	

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00	80,89%	80,89	
---	--------	--------	-------	--